

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Terletak di sebelah selatan Semenanjung Korea dan timur Daratan Asia, Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan lingkungan geopolitik yang rawan terhadap tubrukan kepentingan. Semenjak berdirinya sebagai satu negara, Korea Selatan berperan sebagai jembatan antara berbagai benua dan kekuatan-kekuatan maritim, menjadikannya subjek setiap ada transisi kekuatan di kawasan (Karim, 2018). Bukan hanya itu, Korea Utara pasca Perang Dingin juga semakin intensif dalam melakukan berbagai provokasi melalui program pengembangan nuklir yang dilakukannya. Uji coba nuklir dan misil yang kerap dilakukan oleh Korea Utara tersebut kemudian tidak hanya mempengaruhi stabilitas keamanan di Semenanjung Korea, namun juga secara langsung mengancam keamanan dan keselamatan Korea Selatan sebagai suatu negara, yang sebelumnya pernah menjadi korban agresi Korea Utara dalam Perang Korea (Kim, 2016).

Menyikapi provokasi dan ancaman keamanan dari Korea Utara melalui berbagai uji coba nuklir dan misilnya, Korea Selatan di bawah pemerintahan Park Geun Hye bersama dengan AS bekerjasama untuk menginstalasi sistem anti misil *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) di wilayah Korea Selatan. THAAD merupakan sistem pertahanan anti balistik yang dikembangkan oleh Lockheed Martin, perusahaan senjata AS, pada 1992 untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan menembak jatuh misil jarak pendek-menengah musuh dalam fase terminal mereka (Lockheedmartin, 2018). Lockheed Martin menandatangani kontrak dengan pemerintah AS pada tahun 2007 dan menjadikan THAAD sebagai instrumen untuk mempertahankan atau melindungi pasukan militer AS, pasukan aliansi AS, populasi, dan infrastruktur penting dari serangan misil jarak pendek-menengah, khususnya dari Korea Utara (Institute for Security and Development Policy, 2017). Sebagai bagian dari misi tersebut, AS telah menginisiasi instalasi THAAD di Korea Selatan sejak tahun 2014 dan berlanjut

menuju diskusi resmi terkait instalasi sistem pada Februari tahun 2016 yang ditargetkan mencapai kapabilitas operasionalnya pada Mei 2017. Pada mulanya, Korea Selatan di bawah pemerintahan Park enggan untuk menyetujui instalasi THAAD akibat kontroversi domestik sekaligus khawatir jika THAAD berpotensi memperburuk hubungan bilateral dengan Tiongkok dan Rusia. Namun setelah adanya berbagai tes nuklir Korea Utara pada awal tahun 2016, Park menyetujui instalasi sistem THAAD.

Dari awal kemunculannya, rencana instalasi THAAD mendatangkan protes dari Tiongkok. Oposisi Tiongkok terhadap instalasi THAAD di Korea Selatan pada dasarnya dapat dipetakan ke dalam tiga fase (Panda, 2017). Fase pertama merujuk pada periode sebelum Korea Selatan mengumumkan pada tanggal 7 Februari 2016 bahwa Korea Selatan akan memulai dialog dengan AS terkait instalasi THAAD. Dalam fase ini, protes ditunjukkan melalui berbagai pernyataan luar negeri yang menyatakan kekhawatiran Tiongkok terhadap keputusan Korea Selatan. Fase kedua, terjadi setelah Korea Selatan melakukan pengumuman instalasi. Pada fase ini, Tiongkok mulai menunjukkan retorika diplomatis dalam pernyataan diplomatiknya melalui peringatan akan konsekuensi yang akan diterima Korea Selatan apabila bersikukuh untuk menginstalasi THAAD dan bahwa Tiongkok akan melakukan tindakan yang diperlukan dalam melindungi kedaulatan dan integritas teritorialnya. Fase ketiga, dimulai saat Korea Selatan melakukan pengumuman bersama dengan AS pada 8 Juli 2016 terkait instalasi THAAD. Tindakan ini disikapi Tiongkok dengan melakukan beragam tindakan koersi ekonomi melalui boikot terhadap Korea Selatan.

Dasar dari oposisi Tiongkok adalah terkait dengan radar yang dipasang dalam sistem THAAD memiliki kapabilitas untuk mengintersepsi sistem keamanan Tiongkok (Meick dan Salanova, 2017). Dengan menginstalasi THAAD, Korea Selatan dinilai tidak menghargai kepentingan strategis Tiongkok di kawasan. Protes tersebut dimanifestasikan dalam berbagai bentuk. Pertama, dalam bentuk kecaman berbagai pejabat resmi pemerintah. Tercatat, Menteri Luar Negeri Tiongkok secara konsisten telah mengutarakan oposisinya terhadap instalasi

THAAD melalui lebih dari 50 pernyataan resmi (Meick dan Salidjanova, 2017). Kedua, melalui berbagai penundaan aktivitas diplomatik dengan Korea Selatan, salah satunya dilakukan oleh Menteri Pertahanan Nasional Tiongkok yang menunda dialog pertahanan bilateral. Ketiga, melalui restriksi pariwisata dimana Administrasi Pariwisata Nasional Tiongkok mengeluarkan instruksi untuk mengurangi turis Tiongkok di Korea Selatan hingga 20% (Swaine, 2017). Keempat, melalui koersi ekonomi, salah satunya dengan menutup 75 perusahaan Lotte milik Korea Selatan di Tiongkok dan melarang impor sekitar sembilan belas produk kosmetik Korea Selatan (Ja-young, 2017). Tiongkok juga memperketat prosedur perdagangan, regulasi pajak, dan inspeksi standar bagi produk dari Korea Selatan (KBS World Radio, 2017; Suk-ye, 2016). Juru bicara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Geng Shuang, mengatakan bahwa Tiongkok akan mengambil tindakan yang dibutuhkan untuk melindungi kepentingan keamanan nasional (Taylor, 2017).

Keputusan Korea Selatan untuk menginstalasi THAAD kemudian banyak dinilai tidak hanya mempengaruhi dinamika *uncertainty* keamanan di Semenanjung Korea, namun juga mempengaruhi stabilitas hubungan antara Korea Selatan, Tiongkok, Amerika Serikat, dan bahkan negara lain seperti Rusia dan Jepang (Chen, 2016). Uji coba nuklir Korea Utara yang kembali dilakukan pada tanggal 03 September 2017 sendiri kemudian mendorong percepatan terhadap instalasi empat sistem THAAD tambahan di Korea Selatan di bawah pemerintahan Moon (Institute for Security and Development Policy, 2017).

Moon mengutarakan bahwa Korea Selatan akan semakin memperkuat aliansinya dengan AS untuk menjamin keamanan nasional dan mengokohkan pertahanan negara. Moon menyebutkan bahwa perdamaian hanya dapat terwujud jika ditopang dengan keamanan yang kuat dan solid. Namun demikian, Moon juga tidak abai terhadap oposisi dan retaliasi ekonomi yang dilakukan oleh Tiongkok. Dalam pidatonya, Moon menyampaikan:

“The ROK-U.S. alliance will be further strengthened. In the meantime, I will have serious discussions with the United States and China for the resolution of issues related to THAAD.” (2017).

Terbukti, pada 31 Oktober 2017 Beijing dan Seoul secara publik mengumumkan bahwa kedua negara sepakat untuk memperbaiki hubungan bilateral (Glaser dan Collins, 2017). Pengumuman tersebut diberitakan setelah sebelumnya Moon melakukan kunjungan ke Tiongkok dalam upaya untuk merestorasi hubungan bilateral dan mendiskusikan langkah untuk menyikapi krisis nuklir di Semenanjung Korea. Kunjungan Korea Selatan ke Tiongkok yang berlangsung empat hari menandai perayaan hubungan bilateral yang ke-25 sekaligus kunjungan kenegaraan pertama Korea Selatan pada administrasi Moon Jae In (Choon, 2017). Seoul dan Beijing sepakat untuk bekerja sama bahu-membahu untuk membangun kembali hubungan perekonomian yang terganggu hampir selama satu tahun sekaligus menyatukan visi dalam melakukan denuklirisasi di Semenanjung Korea. Korea Selatan dan Tiongkok sepakat untuk memperbaharui perjanjian *swap* mata uang sebesar USD 56 juta dolar. Selain itu, pemerintah Tiongkok juga berupaya untuk merestorasi rute penerbangan dari domestik menuju Korea Selatan, setelah sebelumnya diblokir. Korea Selatan dan Tiongkok kemudian juga bersama-sama menjadi *host* pertemuan tingkat tinggi *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) di Da Nang, Vietnam pada tanggal 6-11 November 2017 (Foreign Affairs, 2017). Pengumuman publik tersebut disusul dengan pernyataan publik dari Presiden Moon memberikan tiga bentuk jaminan keamanan untuk Tiongkok yang dikenal dengan *three nos*. Pertama, Korea Selatan tidak akan menambah instalasi THAAD di negaranya. Kedua, Korea Selatan setuju untuk tidak terlibat dalam kerangka kerjasama sistem pertahanan misil yang dipimpin AS. Ketiga, Korea Selatan tidak terlibat dalam aliansi trilateral AS-Jepang-Korea Selatan yang diinisiasi oleh AS (Glasser dan Collins, 2017).

Meskipun jaminan tersebut menunjukkan niat baik Korea Selatan untuk tidak mengabaikan kepentingan strategis dari Tiongkok, rupanya normalisasi yang diiringi dengan jaminan keamanan tersebut tidak disambut cukup hangat oleh AS

selaku aliansi Korea Selatan. Penasihat Keamanan Nasional AS, H.R. Master, menyatakan bahwa kesepakatan *three nos* dimasa depan dapat mempengaruhi nilai strategis struktur keamanan yang dibangun oleh AS (Abrahamian, 2017). LeBlanc (2017) juga menjelaskan bahwa jaminan *three nos* tersebut memberikan keuntungan yang signifikan terhadap Korea Utara dan Tiongkok, karena membatasi langkah AS untuk melindungi pasukannya di Semenanjung Korea.

Berangkat dari dinamika di atas tersebut dapat dilihat bahwa terjadi perubahan pendekatan yang dilakukan oleh Korea Selatan dalam menyikapi isu keamanan di kawasan. Korea Selatan yang semula senantiasa enggan untuk menginstalasi sistem pertahanan anti misil, dipertahankan dalam masa pemerintahan Moon ditengah retaliasi dari Tiongkok dan tentangan domestik Korea Selatan sendiri. Oposisi tersebut terbukti berdampak negatif terhadap kondisi perekonomian dan stabilitas domestik Korea Selatan. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait konsepsi peran apa yang berusaha diraih oleh Korea Selatan dibalik kebijakan Moon untuk mempertahankan sistem THAAD.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana kebijakan Korea Selatan untuk menginstalasi dan mempertahankan sistem THAAD dikonstruksi sekaligus mengonstruksi peran yang ingin dimainkan oleh Korea Selatan di Semenanjung Korea pada pemerintahan Moon Jae In?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari laporan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan terhadap bagaimana konsepsi pemerintahan Moon Jae In terkait peran Korea Selatan sebagai aktor kebijakan luar negeri dan keamanan di Semenanjung Korea kemudian menjadi alasan diinstalasi dan dipertahankannya sistem THAAD, terlepas dari protes domestik dan retaliasi Tiongkok.

## **1.4 Tinjauan Pustaka**

Untuk mengawali analisis terhadap topik yang penulis angkat, studi literatur yang penulis lakukan berfokus pada laporan penelitian yang meninjau motif Korea

Selatan untuk menginstalasi sistem THAAD. Dari studi tersebut, penulis memetakan terdapat dua bentuk analisis motif utama dibalik keputusan tersebut. Pertama, yaitu akibat kebutuhan Korea Selatan untuk melindungi negaranya dari ancaman nuklir Korea Selatan. Kedua, yaitu sebagai wujud produk kerjasama aliansi Korea Selatan-AS dan medium kepentingan AS di kawasan. Ketiga, dilandaskan keinginan Korea Selatan untuk menjadi *middle power* yang lebih aktif.

Kelompok literatur pertama merupakan gagasan yang paling mendominasi baik dalam karya ilmiah maupun dalam pemberitaan media. Gagasan utama mereka adalah bahwa instalasi sistem THAAD dilatarbelakangi oleh kebutuhan Korea Selatan untuk meningkatkan pertahanan nasionalnya sebagai respon terhadap ancaman nuklir yang semakin intensif dilancarkan Korea Utara pada awal tahun 2016 (Klingner, 2015; Majumdar, 2017; KEIA, 2017; ISDP, 2017). Korea Selatan juga menerapkan sistem pertahanan mereka sendiri, yang dikenal sebagai *three-axis system* (NIDS, 2017). Namun demikian, penulis menilai pembahasan dalam literatur tersebut cenderung mendasarkan argumen pada justifikasi yang diberikan oleh pemerintahan Moon Jae In dalam pernyataan publiknya terkait respon terhadap ancaman nuklir Korea Utara.

Kelompok literatur kedua meletakkan fokus pada pengaruh hubungan aliansi Korea Selatan-AS sebagai faktor utama yang melatar belakangi kebijakan untuk menginstalasi THAAD. Hipotesis utama yang diusung dari literatur yang menentang ide kelompok literatur pertama bahwa THAAD difungsikan untuk melindungi masyarakat Korea Selatan adalah bahwa jangkauan intersepsi dari THAAD hanya seluas 200 km, mencakup wilayah Osan (tempat pangkalan udara AS), Pyongtaek (tempat markas AS militer AS di Korea Selatan), Gyeryongdae (markas militer Korea Selatan), dan situs energi nuklir (Elleman, 2016; Kang, 2017; Park dan Inwook, 2019). Mereka menilai, penempatan THAAD ditujukan lebih untuk melindungi kekuatan militer AS, karena THAAD tidak dapat melindungi wilayah pusat dimana separuh populasi Korea Selatan tinggal. Para ahli dari Tiongkok berargumen bahwa THAAD hanya menyediakan proteksi yang

terbatas, dimana sistem THAAD didesain untuk mengintersepsi misil medium, sementara misil Korea Utara yang mengancam keamanan Korea Selatan bersifat jarak pendek. Dengan kata lain, Korea Selatan menjadi medium AS untuk menyikapi ancaman nuklir yang datang dari Korea Utara dan Tiongkok. Gagasan ini sejalan dengan literatur yang membahas mengenai kekhawatiran Tiongkok dan alasan dibalik retaliasi yang Tiongkok lakukan, bahwa strategi untuk menyikapi ancaman nuklir Korea Utara merupakan dalih dari AS untuk membendung kekuatan Tiongkok berikut kepentingan strategisnya di kawasan (Tong, 2017).

Kelompok literatur ketiga kemudian lebih menyorot dari sudut pandang Korea Selatan sebagai *middle power*. Sebagai aliansi dari AS, Korea Selatan senantiasa menyambut strategi *rebalancing* AS, dimana AS dipercaya untuk menjaga komitmennya sebagai pemimpin sekaligus partner terpercaya di kawasan Asia Pasifik. Prioritas utama dari strategi *rebalance* adalah memperkuat aliansi AS-Korea Selatan, yang kemudian menjadi agenda yang menguntungkan kedua belah pihak. Hal tersebut ditunjukkan dengan sambutan Korea Selatan terhadap upaya penguatan aliansi melalui 2009 US-ROK *Joint Vision Statement* dan 2013 60th *Anniversary Statement on the Joint Vision for Alliance* (Snyder, 2015; Min, 2015, He, 2017).

Dari tiga kelompok literatur utama tersebut, terdapat beberapa kelemahan atau kekurangan yang kemudian penulis temukan. Banyak literatur yang cenderung berfokus pada perdebatan teknis antara klaim Korea Selatan-AS dengan klaim Tiongkok. Pada dasarnya, pemahaman terhadap kapasitas teknis dari sistem THAAD bersifat penting untuk mengawali analisis terhadap kebijakan luar negeri Korea Selatan. Namun kemudian, informasi mengenai kapasitas suatu teknologi kemudian tidak serta merta menjelaskan bagaimana sistem tersebut nantinya akan dioperasikan maupun intensi dibalik pengoperasiannya. Masih ada suatu bentuk *uncertainty* informasi mengingat sistem anti misil AS hingga kini masih belum diuji dalam skenario pertempuran atau peperangan yang sesungguhnya. Baik argumen AS-Korea Selatan dan Tiongkok sama-sama memuat logika teknis dan strategis, jika menggunakan sudut pandang dari pihak yang menyampaikan. Oleh

karena itu, penulis menilai analisis teknis kurang memiliki kekuatan penjas terhadap faktor yang mendorong Korea Selatan untuk menginstalasi sistem THAAD ataupun dalam membantu menulis menjawab rumusan penelitian, meskipun *gap* persepsi terhadapnya tetap perlu untuk dicatat.

Aspek strategis yang kemudian diangkat pada kelompok literatur kedua dalam menganalisis kasus instalasi sistem THAAD kemudian menurut penulis cenderung untuk melihat dinamika hubungan antara Korea Selatan, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Tema yang diangkat adalah seputar penguatan aliansi Korea Selatan dan AS, deteriorisasi hubungan antara Korea Selatan dengan Tiongkok, dan tubrukan kepentingan strategis antara Tiongkok dengan AS. Namun demikian, kurang adanya penggalian lebih lanjut terkait keputusan dalam menginstalasi sistem THAAD sebagai suatu bentuk kebijakan luar negeri Korea Selatan.

Berangkat dari studi literatur tersebut, penulis membuat kesimpulan bahwa analisis terhadap kebijakan Korea Selatan dibawah pemerintahan Moon untuk mempertahankan instalasi sistem THAAD tidak dapat sebatas didasarkan pada diskursus terkait kerangka pertahanan misil ataupun justifikasi resmi dari Korea Selatan. Narasi terkait peningkatan pertahanan untuk menyikapi ancaman misil sendiri dalam studi literatur yang dilakukan menjadi argumen yang paling banyak digunakan dibalik rasionalisasi Korea Selatan untuk menginstalasi dan mempertahankan sistem THAAD. Padahal, perlu dilakukan analisis yang lebih dalam terkait aspek strategis dibalik keputusan Korea Selatan dalam melanggengkan sistem THAAD, khususnya terhadap Korea Selatan secara *in per se* sebagai aktor aktif dalam kebijakan luar negeri.

Kelompok literatur ketiga kemudian menurut penulis menyediakan pembukaan yang menarik dengan mengangkat gagasan Korea Selatan sebagai *middle power*. Artinya, penempatan sistem THAAD oleh Korea Selatan tidak sebatas dilatar belakangi oleh problem keamanan atau ekstensi kepentingan dari AS sebagai aliansinya, namun juga menyorot peran diri dari Korea Selatan sebagai aktor aktif



yang berkepentingan untuk menjembatani kepentingan antara AS dan Tiongkok selaku *middle power*. Namun demikian, penulis kurang menemukan eksplanasi distingsi yang jelas antara konsep *middle power* sebagai status dan *middle power* sebagai peran. Selain itu, fokus penelitian sebelumnya tidak memunculkan keterkaitan analitikal antara upaya Korea Selatan untuk menjadi *middle power* yang lebih aktif dengan keputusan Korea Selatan untuk menginstalasi THAAD maupun pembahasan terhadap faktor-faktor yang mengonstruksinya. Penelitian ini kemudian berusaha untuk mengisi *gap* tersebut dengan menganalisis bagaimana kebijakan Korea Selatan untuk menginstalasi dan mempertahankan sistem THAAD dikonstruksi sekaligus mengonstruksi peran yang ingin diraih oleh Korea Selatan pada pemerintahan Moon Jae In sebagai aktor kebijakan luar negeri dan keamanan di kawasan.

### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Berangkat dari tinjauan literatur tersebut, penulis menemukan *gap* yang merujuk pada kurangnya elaborasi dan atau eksplanasi alternatif yang mengaitkan antara rasionalisasi Korea Selatan terhadap keputusannya untuk menginstalasi dan mempertahankan sistem THAAD dengan peran perilakunya sebagai aktor kebijakan luar negeri dan keamanan di kawasan. Untuk itu, sebagai kerangka pemikiran, penulis menggunakan Teori Peran dari Holsti (1970) untuk menganalisis konsepsi peran nasional Korea Selatan untuk menjawab rumusan masalah.

#### **1.5.1 Teori Peran sebagai Alat Analisis Kebijakan Luar Negeri**

Berangkat dari kebutuhan penulis untuk menganalisis keterkaitan antara suatu kebijakan luar negeri suatu negara dengan peran, penulis memilih menggunakan Teori Peran sebagai alat analisis. Teori Peran pertama kali diperkenalkan oleh Holsti (1970) dalam artikelnya yang berjudul "National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy". Kajian terhadap Teori Peran pada dasarnya bermula dari studi sosiologi, psikologi sosial, dan antropologi. Namun dalam karyanya, Holsti tidak mengimpor bahasa konseptual atau teoretik dari studi-studi tersebut, melainkan mengadopsi satu gagasan dasar bahwa Diri (*Self*), yang merujuk pada

negara, memiliki bentuk-bentuk kepercayaan atau citra akan identitas yang dimiliki (Theis, 2009). Argumen utama dari Teori Peran adalah bahwa konsepsi peran nasional suatu negara dan ekspektasi yang diterima oleh negara lain menjadi konstruksi terhadap performa kebijakan negara tersebut (Holsti, 1970). Karena pendekatan konstruktif yang digunakan, Breuning (2011) mengatakan bahwa Teori Peran dapat digolongkan pada perspektif konstruktivisme sosial yang kemudian menekankan pada urgensi persepsi yang dimiliki oleh perumus kebijakan. Breuning bahkan menjelaskan bahwa Teori Peran telah terlebih dahulu menggunakan pendekatan konstruktivis sebelum perspektif konstruktivisme menjadi salah satu perspektif *mainstream* dalam studi Hubungan Internasional.

Terdapat beberapa kritik dari akademisi analisis kebijakan luar negeri terhadap Teori Peran yang dicetuskan oleh Holsti. Pertama, mereka meragukan kekuatan analitikal dari Teori Peran karena teori tersebut dikembangkan dari bidang studi yang berbeda (sosial dan psikologi) untuk menganalisis bidang yang juga berbeda (kebijakan luar negeri dan hubungan internasional) (Ifantis, 2015). Beckman (2017) disisi lain, menjawab permasalahan tersebut dengan berargumen bahwa meskipun Teori Peran berangkat dari studi psikologi sosial, analisis kebijakan luar negeri dapat memanfaatkan kekayaan konseptualnya untuk mengorganisir dan memunculkan pemahaman terhadap apa yang sudah mereka mengerti.

Kritik kedua, yakni terkait bagaimana penelitian terhadap Teori Peran dieksekusi, melihat Teori Peran menggunakan berbagai level analisis dalam penelitiannya. Cantir dan Kaarbo (2012) menjelaskan bahwa alasan analisis Teori Peran berfokus pada perumus kebijakan sebagai fokus analisis adalah karena Teori Peran merupakan teori yang dikembangkan oleh para sosiolog dan psikolog untuk memahami perilaku seorang individu. Itulah mengapa karena perumus kebijakan suatu negara merepresentasikan individu, menjadi lebih relevan bagi analisis Teori Peran untuk berfokus pada mereka dibandingkan dengan level analisis yang berbeda.

Atas respon terhadap kritik-kritik tersebut, pada dasarnya analisis Teori Peran menekankan dua aspek utama terhadap konsepsi peran nasional (Abramson dan Grillot 1996; Adigbuo 2007; Cantir dan Kaarbo 2012). Akademisi-akademisi tersebut, menggunakan pendekatan konstruktivis, berargumen bahwa konsepsi peran nasional suatu negara merupakan suatu bentuk konstruksi sosial sehingga konsepsi tersebut juga turut membangun fenomena sosial yang dirasakan oleh para individu. Hal ini sejalan dengan argumen Wendt (1994) yang menyatakan bahwa kepentingan nasional suatu negara dilihat dari bagaimana suatu negara melihat dirinya berikut relasinya dengan negara lain, dengan menciptakan identitas sosial baik di level domestik maupun sistemik.

Aspek kedua, meskipun kemudian identitas tersebut tidak diusung secara konsensus antara para elit dan masyarakat, elitlah yang merupakan aktor yang berfungsi sebagai pengambil kebijakan suatu negara yang menaungi masyarakat tersebut. Hal ini sejalan dengan argumen Putnam (1988) melalui gagasan *two level games*, bahwa pemimpin politik suatu negara secara simultan memainkan dua bentuk ‘permainan’, yaitu di level domestik dan internasional. Di level domestik, pemimpin tersebut berperan untuk menjelaskan dan atau menjustifikasi kebijakan yang mereka ambil terhadap masyarakat, parlemen, dan sejenisnya.

Senada dengan argumen tersebut, Rosenau (1966) mengungkapkan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara merupakan hasil kombinasi dari faktor internal (domestik) dan eksternal (internasional). Pendekatan inilah yang kemudian disebut oleh Walker (1987), Breuning (2011), dan Thies (2009) sebagai kelebihan Teori Peran, khususnya dalam aspek organisasional, dimana Teori Peran dapat mengolaborasikan pembahasan terhadap level-level analisis yang ada dalam studi Analisis Kebijakan Luar Negeri melalui proses orientasi antara agensi dan struktural.

Meskipun semula penulis menyertakan narasi Breuning terkait adanya kesamaan Teori Peran dengan pendekatan konstruktivis, penulis perlu menekankan bahwa Teori Peran tidak merujuk pada satu teori tertentu, melainkan merupakan sesuatu

yang disebut Thies (2000) sebagai “family of theories”, yaitu suatu pendekatan atau persepektif yang meletakkan konsep peran sebagai aspek sentral dalam analisis sosial. Penelitian ini kemudian juga mengusung tujuan untuk membuktikan relevansi kekuatan penjelasnya dalam analisis kebijakan luar negeri Korea Selatan.

### **1.5.2 Teori Peran sebagai Alat Analisis Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan**

Telah dijelaskan bahwa dalam menganalisis Teori Peran, diperlukan analisis terhadap situasi internal yang kemudian dapat dirujuk sebagai refleksi sumber konsepsi peran nasional. Holsti (1970) menjelaskan bahwa dalam memilih variabel-variabel yang mengonstruksi konsepsi peran nasional suatu negara dapat berbeda antara satu dengan negara lain, tergantung dengan karakteristik negara tersebut serta kebutuhan analisis dalam penelitian. Namun demikian, Holsti (1970) juga menyediakan variabel umum yang dalam karyanya dia gunakan untuk memetakan konsepsi peran negara di era Perang Dingin, yaitu lokasi, sumber daya negara, kemampuan, kebutuhan sosio-ekonomi, nilai-nilai nasional, ideologi, peran tradisional, opini publik, karakter, dan kebutuhan politis. Penggunaan variabel-variabel tersebut menurut Aggestam (1999) dianggap terlalu kompleks karena mengharuskan para pengguna Teori Peran untuk melihat berbagai sumber dari peran yang menjadi atribut nasional suatu negara (Aggestam, 1999).

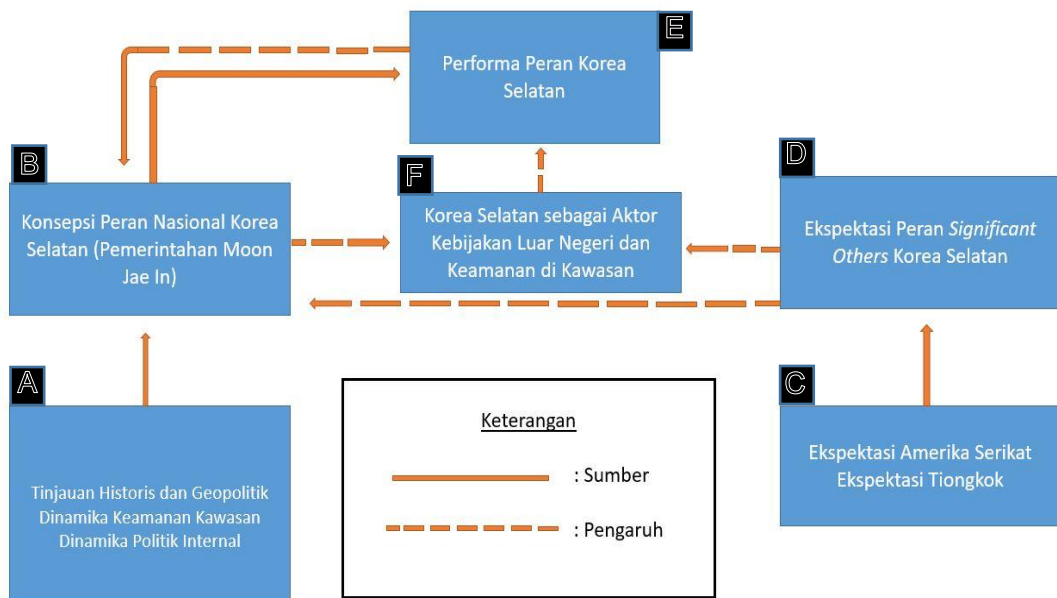
Untuk kepentingan penelitian ini, penulis menggunakan argumen dari Graf dan Lanz (2013) yang memetakan proses analisis ke dalam tiga aspek, yaitu dinamika struktural, dinamika politik domestik, dan interaksi dengan aktor lain. Aspek pertama menjelaskan bahwa ketika konfigurasi sistem internasional berubah, maka konsepsi peran nasional suatu negara dapat beradaptasi dan mempengaruhi bagaimana perumus kebijakan mengonsepsikan peran yang menurut mereka paling sesuai untuk dilakukan atau diwujudkan. Aspek kedua menjelaskan bagaimana konsepsi peran nasional juga dipengaruhi oleh aspek-aspek politik domestik seperti perubahan kepemimpinan. Aspek ketiga menjelaskan terkait bagaimana konsepsi peran terbentuk sebagai respon terhadap isyarat atau

permintaan dari negara lain, sehingga negara tersebut dapat memodifikasi kebijakan yang diambil.

Negara yang kemudian penulis pilih untuk menjadi fokus dari aktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan Korea Selatan penulis ambil dari argumen Karim (2018), yang menyatakan bahwa Korea Selatan dipengaruhi oleh ekspektasi AS dan Tiongkok sebagai *significant others* terkait perannya sebagai aktor kebijakan luar negeri dan keamanan di kawasan. Argumen tersebut didorong fakta bahwa AS merupakan aliansi keamanan utama Korea Selatan sedangkan Tiongkok merupakan partner ekonomi terbesar Korea Selatan sekaligus aktor kunci dalam kawasan. Pemilihan AS dan Tiongkok sebagai *significant others* Korea Selatan sejalan dengan kepentingan penulis untuk menganalisis peran Korea Selatan sebagai aktor kebijakan luar negeri dan keamanan di Semenanjung Korea.

Berangkat dari pemilihan variabel-variabel tersebut, diperoleh alur pemikiran sebagai berikut:

**Bagan 1.** Visualisasi Kerangka Pemikiran Teori Peran sebagai Alat Analisis



(Sumber: Analisis Penulis, diadopsi dari bagan Teori Peran Holsti)

Bagan kerangka pemikiran di atas merupakan ilustrasi dari logika Teori Peran yang penulis gunakan dalam analisis penelitian ini. Analisis diawali dengan pembahasan terhadap empat aspek, yaitu (1) tinjauan historis dan geopolitik Korea Selatan, (2) dinamika geopolitik kawasan, (3) kekuatan nasional Korea Selatan, dan (4) dinamika domestik Korea Selatan (Bagan A). Empat aspek tersebut ditentukan dari keunikan atau karakteristik dari situasi geopolitik dan politik domestik Korea Selatan yang menjadikan kekhasannya sebagai aktor kebijakan luar negeri. Pemetaan terhadap aspek-aspek tersebut penulis gunakan untuk membangun dan memberikan konteks terhadap bagaimana Korea Selatan di bawah pemerintahan Moon Jae in mengonsepsikan perannya sebagai aktor kebijakan luar negeri dan kawasan di Semenanjung Korea (Bagan B).

Konsepsi tersebut kemudian turut dipengaruhi oleh ekspektasi *significant others* yang menjadi representasi aktor yang memiliki signifikansi terhadap pengambilan keputusan Korea Selatan, yaitu AS dan Tiongkok (Bagan C). Analisis terhadap ekspektasi tersebut kemudian dilihat dari narasi ekspektasi manifes dan laten Tiongkok dan AS, dimana dalam penelitian ini bertumpu terhadap kebijakan Korea Selatan dalam menginstalasi sistem THAAD (Bagan D).

Proses interaksi antara B dan D, kemudian menjadi sumber terhadap bagaimana Korea Selatan memanifestasikan peran-peran yang telah dikonsepsikan menjadi suatu performa (Bagan E) terkait dengan statusnya sebagai aktor kebijakan luar negeri dan keamanan di Semenanjung Korea (Bagan F). Performa peran tersebut kemudian juga turut menjadi variabel yang mengonstruksi konsepsi peran dan status Korea Selatan di kawasan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa inti logika penulis adalah dengan menarik latar belakang permasalahan ke dalam konteks yang lebih luas (agensi dan struktural) untuk kemudian memberikan pemahaman terhadap suatu kebijakan luar negeri yang bersifat spesifik (kebijakan menginstalasi dan mempertahankan sistem THAAD).

### **1.6 Hipotesis**

Berangkat dari kerangka pemikiran yang digunakan, penulis mengajukan hipotesis bahwa kebijakan Korea Selatan dalam menginstalasi dan mempertahankan sistem THAAD merupakan produk dari konsepsi Moon Jae In terkait peran yang berusaha diraih oleh Korea Selatan di Semenanjung Korea. Konsepsi tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni dinamika politik internal Korea Selatan, perubahan lingkungan keamanan kawasan, serta ekspektasi AS dan Tiongkok selaku *significant others* Korea Selatan.

### **1.7 Metodologi Penelitian**

Walker (1987) menjelaskan bahwa Teori Peran lebih berfungsi sebagai kerangka konseptual dalam suatu penelitian, dimana para peneliti menggunakan banyak variasi metodologi. Metodologi dalam Teori Peran bersifat netral dan telah digunakan hampir seluruh alat metodologi oleh para peneliti sosial (Biddle, 1979). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis konten kualitatif sebagai metodologi penelitian.

Analisis konten merupakan metodologi untuk meneliti perilaku suatu aktor secara tidak langsung, yaitu melalui analisis terhadap bagaimana mereka berkomunikasi. Penulis menganalisa konten komunikasi tertulis maupun verbal sebagai sumber. Metode analisis konten merupakan pendekatan yang menurut penulis paling sesuai dalam mengidentifikasi konsepsi peran karena sesuai yang dijelaskan oleh Backman (1970) bahwa pendekatan induktif melalui analisis konten dapat menyediakan klasifikasi peran yang lebih kaya.

Dalam penelitian ini, terdapat enam tahapan dalam metode analisis konten. Pertama, menentukan tujuan dari analisis konten. Kedua, mendefinisikan populasi. Ketiga, menentukan sampel. Keempat, melakukan spesifikasi unit analisis. Kelima, melakukan formulasi terhadap kategori kodifikasi. Keenam, menginterpretasi data analisis konten.

Pertama, menentukan tujuan metode analisis konten. Dalam penelitian ini, tujuan utamanya adalah untuk menganalisis peran apa yang dikonsepsikan oleh Korea

Selatan dalam pemerintahan Moon Jae In sebagai aktor kebijakan luar negeri dan keamanan di kawasan

Kedua, mendefinisikan populasi. Populasi merujuk pada seperangkat unit yang akan digeneralisasi atau basis dari sampel yang akan digunakan (Kimberly, 2002). Dalam penelitian ini, populasi merujuk pada pidato dan pernyataan politik dari aktor kunci kebijakan luar negeri dan keamanan Korea Selatan. Selain itu, populasi juga dipilih dari dokumen resmi Korea Selatan terkait kebijakan luar negeri dan keamanan Korea Selatan yang memuat tanggung jawab, kewajiban, fungsi, tugas, dan orientasi Korea Selatan sebagai aktor luar negeri dan keamanan.

Ketiga, menentukan sampel yang akan dianalisis. Penentuan sampel merujuk pada proses untuk menyeleksi subset unit dari populasi yang lebih besar (Kimberly, 2002). Dengan menggunakan metode *purposive sampling*, penulis menganalisis pidato dan pernyataan politik yang disampaikan oleh Presiden Korea Selatan, Moon Jae In. Hal tersebut sesuai dengan argumen Holsti (1970) yang menyebutkan bahwa konsepsi peran nasional harus dianalisis dari pernyataan perumus kebijakan tingkat tertinggi suatu negara. Sementara dari sumber sekunder, penulis melakukan *sampling* terhadap dokumen nasional yang dirilis pemerintah.

Keempat, spesifikasi unit analisis. Unit disini merujuk pada komponen pesan yang dapat diidentifikasi, yang kemudian dipilih mana ranah dapat menjadi dasar dari analisis. Unit didapat dari mengurai suatu bentuk komunikasi menjadi bentuk seperti kata, karakter, tema, dan interaksi (Fraenkel dan Wallen, 2006). Pada penelitian ini, unit analisis penulis spesifikasi dari kalimat, frase, dan kata yang merujuk pada peran Korea Selatan sebagai aktor luar negeri dan keamanan di Semenanjung Korea.

Kelima, kategorisasi dari *coding*. Terdapat dua cara kategorisasi dalam analisis konten. Pertama, yaitu melalui koding data menggunakan kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Kedua, *coding* data menggunakan kategori yang muncul



dalam atau selama analisis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara kedua. Penulis menggunakan pendekatan dari Holsti (1970) untuk mengidentifikasi konsep diri Korea Selatan, dimana penulis melakukan kodifikasi terhadap data setelah melakukan analisis terhadap pidato, pernyataan politik, dan dokumen resmi.

Keenam, menginterpretasi data pada analisis konten. Terdapat dua cara umum yang digunakan dalam menginterpretasi data pada analisis konten, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan umum yang digunakan dalam menginterpretasi analisis konten oleh peneliti sosial adalah melalui analisis frekuensi, dimana peneliti menghitung seberapa banyak kata, frase, dan simbol tertentu muncul, untuk kemudian diukur proporsi dan presentasi dari variabel yang muncul dari total insiden dari sampel (Fraenken dan Wallen, 2006). Namun demikian, dalam penelitian ini, penulis tidak berusaha untuk mengukur frekuensi dari konsepsi peran yang muncul dalam pidato dan dokumen. Penulis bertujuan untuk mengidentifikasi peran Korea Selatan sebagai aktor kebijakan luar negeri dan keamanan di Semenanjung Korea pada pemerintahan Moon Jae In, sehingga dibandingkan menggunakan pendekatan kuantitatif, penulis menerapkan pendekatan kualitatif dalam menganalisis data.

Pidato dan dokumen resmi yang memuat kata, frase, dan kalimat yang merujuk pada konsepsi-konsepsi peran nasional Korea Selatan di bawah pemerintahan Moon Jae In penulis dapatkan dari kodifikasi terhadap konten manifes dan konten laten. Konten manifes merujuk pada bentuk komunikasi yang gamblang, tanpa bentuk makna tertentu yang menaungi (Fraenkel dan Wallen, 2006). Sedangkan konten laten dari pidato dan dokumen resmi Korea Selatan juga dikodifikasi dengan menganalisis makna apa yang muncul dari bentuk komunikasi yang ada. Setelah mengidentifikasi konsepsi peran, penulis menguji konsepsi peran tersebut dengan performa Korea Selatan sesuai dengan peran yang dikonsepsikan, baik secara normatif maupun fungsional.

## **1.7.1 Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Konsep**

### **1.7.1.1 Konsepsi Peran Nasional**

Konsepsi peran nasional merupakan konsep dasar dari Teori Peran yang diperkenalkan oleh Holsti (1970). Konsepsi peran dapat didefinisikan sebagai seperangkat norma yang mendorong perumusan kebijakan luar negeri, termasuk di dalamnya perilaku, keputusan, respon, hingga komitmen yang dibuat oleh pemerintah. Singkatnya, konsepsi peran merujuk pada persepsi pembuat kebijakan luar negeri terhadap posisi negaranya dalam sistem internasional. Konsepsi peran berfungsi sebagai dua bentuk variabel, yaitu independen dan dependen. Sebagai variabel independen, konsepsi peran menjadi variabel penjelas terhadap perilaku negara dalam tatanan internasional. Sebagai variabel dependen, konsepsi peran dibentuk melalui interaksi antar negara dalam sistem internasional maupun politik domestik (Karim, 2018).

Dalam penelitian ini, konsepsi peran nasional diekstraksi dari bagaimana Moon Jae In sebagai aktor kunci dalam perumusan kebijakan luar negeri dan keamanan Korea Selatan mengonsepsikan peran Korea Selatan dalam Semenanjung Korea. Holsti (1970) menjelaskan bahwa analisis terhadap konsepsi peran perlu diletakkan pada perumus kebijakan level tertinggi suatu negara, yang mana merujuk pada presiden selaku diplomat tertinggi. Untuk sumber konsepsi peran, penulis menggunakan argumen dari Graf dan Lanz (2013) yang meninjau tiga aspek utama, yaitu dinamika sistem internasional, interaksi dengan aktor lain, dan dinamika politik domestik. Namun demikian, untuk variabel interaksi dengan aktor lain penulis pisahkan dalam bab pembahasan yang berbeda, karena mencakup konsepsi ekspektasi peran dari kerangka konseptual Holsti.

### **1.7.1.2 Ekspektasi Peran**

Penulis menggunakan definisi dari Walker (1987) terhadap ekspektasi peran, yaitu peran yang diproyeksikan oleh aktor lain atau pada umumnya *significant others* terhadap suatu aktor terkait bagaimana mereka mengonsepsikan peran yang dimiliki. Analisis terhadap ekspektasi peran dilakukan terhadap pernyataan terkait obligasi dan tanggung jawab yang disampaikan oleh *signifant others* Korea

Selatan, yang merujuk pada AS, Tiongkok, dan Korea Utara. Sama halnya dengan analisis terhadap konsepsi peran, ekspektasi peran juga digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu ekspektasi manifes dan ekspektasi laten. Ekspektasi manifes merujuk pada ekspektasi yang disampaikan secara eksplisit terkait bagaimana Korea Selatan seharusnya berperan sebagai aktor keamanan dan kebijakan luar negeri di Semenanjung Korea, khususnya dalam menyikapi krisis nuklir Korea Utara. Sedangkan ekspektasi laten diambil melalui observasi dan analisis terhadap ekspektasi implisit yang disampaikan oleh pihak lain.

Untuk menganalisis ekspektasi eksternal terhadap Korea Selatan, perlu dipahami bahwa tidak semua negara memiliki signifikansi yang sama dalam mengonstruksi peran Korea Selatan. Lucarelli (2013) menjelaskan bahwa tingkat sensitivitas dari ekspektasi peran dipengaruhi oleh tingkat otoritas dari *significant others* tersebut. Konsep dari *significant others* banyak digunakan dalam penelitian untuk merujuk pada aktor-aktor dimana ekspektasi mereka memiliki pengaruh yang besar terhadap identitas dan peran suatu negara. Dalam hubungan internasional, *significant others* tersebut tidak dapat dipilih secara acak, dan perlu dikaitkan dengan sejarah atau hubungan dengan pemilik peran (Harnisch, 2011).

Dalam penelitian ini, *significant others* tersebut merujuk pada dua negara kunci dalam dinamika Korea Selatan di kawasan Semenanjung Korea. Pertama, AS, sebagai aliansi tradisional Korea Selatan. Kedua, Tiongkok, sebagai partner ekonomi terbesar Korea Selatan sekaligus salah satu aktor kunci dalam isu keamanan di Semenanjung Korea.

### **1.7.1.3 Performa Peran**

Penulis menggunakan definisi dari Holsti (1987) terhadap performa peran, yaitu perilaku atau kebijakan sesungguhnya yang kemudian dilakukan oleh seorang aktor dalam memainkan peran yang dikonsepsikannya. Dalam penelitian ini, performa peran merujuk pada perilaku serta kebijakan luar negeri dan keamanan yang dikeluarkan oleh Korea Selatan di bawah pemerintahan Moon Jae In terkait peran yang dikonsepsikan Moon sebagai aktor di kawasan Semenanjung Korea.

Evaluasi terhadap performa peran dianalisis dengan melihat relevansinya dengan konsepsi peran nasional yang ada.

### **1.7.2 Tipe Penelitian**

Berangkat dari kerangka pemikiran di atas, penelitian penulis bertipe eksplanatif. Tipe penelitian eksplanatif merujuk pada penelitian yang mencoba untuk melihat hubungan pengaruh antar variabel yang ada. Analisis terhadap hubungan variabel tersebut kemudian digunakan untuk menjelaskan fenomena yang diamati (Creswell, 1994).

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah melalui studi literatur, memanfaatkan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer didapatkan dari rilis resmi pemerintah yang dikumpulkan melalui situs resmi dan kantor berita resmi. Sumber sekunder berasal dari buku, jurnal, artikel, dokumen pemerintah atau makalah, video, jurnal, dan survei relevan yang dipublikasikan dalam berbagai media seperti internet (Danial dan Warsiah, 2009).

### **1.7.4 Teknik Analisis Data**

Untuk kepentingan tulisan ini, penulis menggunakan analisis konten sebagai teknik analisis data. Analisis konten merupakan metodologi untuk meneliti perilaku suatu aktor secara tidak langsung, yaitu melalui analisis terhadap analisis dari bagaimana mereka berkomunikasi. Penulis menganalisa konten komunikasi tertulis maupun verbal sebagai sumber. Metode analisis konten merupakan pendekatan yang menurut penulis paling sesuai dalam mengidentifikasi konsepsi peran karena sesuai yang dijelaskan oleh Backman (1970) bahwa pendekatan induktif melalui analisis konten dapat menyediakan klasifikasi peran yang lebih kaya.

### **1.7.5 Ruang Lingkup dan Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian yang ditetapkan penulis dalam penelitian adalah satu tahun dari masa pemerintahan Moon Jae In dari Mei tahun 2017 hingga Mei tahun 2018. Namun demikian, kajian penulis diawali semenjak dari masa pra-kemerdekaan

Korea Selatan dengan maksud untuk memetakan fakta historis dan situasi geopolitik Korea Selatan.

#### **1.7.6 Sistematika Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis terbagi ke dalam lima bab pembahasan. Bab I memuat latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka, hipotesis, dan metodologi penelitian. Bab II meninjau analisis sumber pertama konsepsi peran nasional yang mencakup tinjauan historis dan geopolitik Korea Selatan, kekuatan nasional Korea Selatan, transformasi lingkungan internasional dan kawasan, serta dinamika politik domestik. Bab III menganalisis dua pokok kajian utama. Pertama, yaitu ekspektasi AS dan Tiongkok terhadap Korea Selatan serta dampaknya terhadap opini publik Korea Selatan. Kedua, konsepsi peran nasional yang disampaikan Moon melalui pernyataannya. Bab IV memuat evaluasi terhadap konsepsi peran nasional yang disampaikan dengan mengkaji performa peran Korea Selatan. Dalam bab ini penulis kemudian juga menganalisis bagaimana THAAD dikonstruksi dan mengonstruksi konsepsi peran nasional yang telah dipetakan. Bab V memuat kesimpulan terhadap seluruh laporan penelitian.